



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT HUMAN CAPITAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARWAKHUDIN WIDIARSO
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 259535

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.536.000.000

1. Tanah Seluas 1750 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 81.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.355.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m2/176 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/90 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 558.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 335.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI LAKI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 50.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 785.072.608

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 53.000.000

**Sub Total**

Rp. 4.982.072.608



III. HUTANG

Rp. 230.121.238

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.751.951.370

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : SATUAN PENGAWAS INTERN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **LANGGENG WISNU ADINUGROHO**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **224686**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. **4.000.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/119 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/110 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 1995 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. **671.000.000**

1. MOTOR, BENELLI BENELLI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, MERCY BOXER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, LAINNYA Rp. 375.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. **100.000.000**

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. **440.334.928**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.211.334.928
III. HUTANG	Rp.	436.380.119
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.774.954.809

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EKO YOGA CAHYO UTOMO
2. Jabatan : PEMIMPIN WILAYAH
3. NHK : 234074

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.650.000.000**

1. Tanah Seluas 340 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/70 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 252 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 468.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, YAMAHA R. 25 R.25 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, YMAHA N-MAX SCOTER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, NEW MEGA PRO STANDAR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOBIL, HONDA CIVIC FB Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



6. MOBIL, TOYOTA INOVA DIESEL Tahun 2019, LAINNYA Rp.  
255.000.000

7. MOTOR, VESPA PTS 90 Tahun 1978, LAINNYA Rp. 10.000.000

<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>57.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>318.820.229</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>2.493.820.229</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	<b>200.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>2.293.820.229</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ARJUN ANSOL SIREGAR
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 224683

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.047.900.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/115 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 244.800.000
2. Tanah Seluas 492 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 172.200.000
3. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 112.500.000
4. Tanah Seluas 235 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 618.400.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/220 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 605.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA LX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 423.657.626

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 4.076.557.626



III. HUTANG

Rp. 248.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.828.557.626

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RINI ANDRIDA
2. Jabatan : KEPALA AUDITOR INTERNAL WILAYAH V
3. NHK : 234095

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	1.700.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/110 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	150.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	450.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	335.157.946
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	292.874.073
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.928.032.019
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	2.928.032.019

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT BISNIS

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **BOWO KRISTIYONO**
2. Jabatan : **KEPALA DIVISI**
3. NHK : **246607**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **720.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m<sup>2</sup>/60 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **1.351.002.400**

1. MOBIL, HONDA CITY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 138.500.000
2. MOBIL, TOYOTA VENTURER Tahun 2019, LAINNYA Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2023, LAINNYA Rp. 812.502.400

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **282.800.000**

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. **640.929.041**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **190.964.853**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **3.185.696.294**

**III. HUTANG** Rp. **1.031.321.808**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.154.374.486**

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PERUM BULOG  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT HUMAN CAPITAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : JOKO PAMUNGKAS
2. Jabatan : KEPALA DIVISI
3. NHK : 697680

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	<b>850.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	<b>265.500.000</b>
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	<b>9.900.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	<b>50.185.847</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	<b>1.175.585.847</b>
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	<b>1.175.585.847</b>

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.